PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUBLIK

PADA DPMPTSP KABUPATEN BADUNG

2020

MANGUPURA

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Buku Pengelolaan Sistem Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dapat kami selesaikan. Kami berharap buku ini dapat memberikan gambaran umum tentang pengelolaan sistem informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung saat ini telah memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik berupa media informasi elektronik yang merupakan terjemahan dari Sistem Informasi Publik Instansi secara keseluruhan meliputi : penyimpanan, pengelolaan informasi, mekanisme penyampaian informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan adanya Buku Pengelolaan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung diharapkan Pemerintah Kabupaten Badung dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat dari waktu ke waktu secara berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mengelola informasi publik di daerah sesuai dengan amanat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, perlu disusun pedoman dan dokumentasi pengelolaan sistem informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan informasi yang memenuhi standar yan gtelah ditetapkan

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung

TUJUAN

Dokumentasi Pengelolaan Sistem Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung ini bertujuan agar keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pelayanan menjadi sebuah kewajiban dan keniscayaan bagi insan-insan pelayanan publik khususnya di Kabupaten Badung dalam menerapkan berbagai usaha dan inovasi pelayanan informasi publik menuju ke tingkat yang lebih baik dari waktu ke waktu disamping sebagai pedoman informasi resmi bagi masyarakat dalam menerima pelayanan.

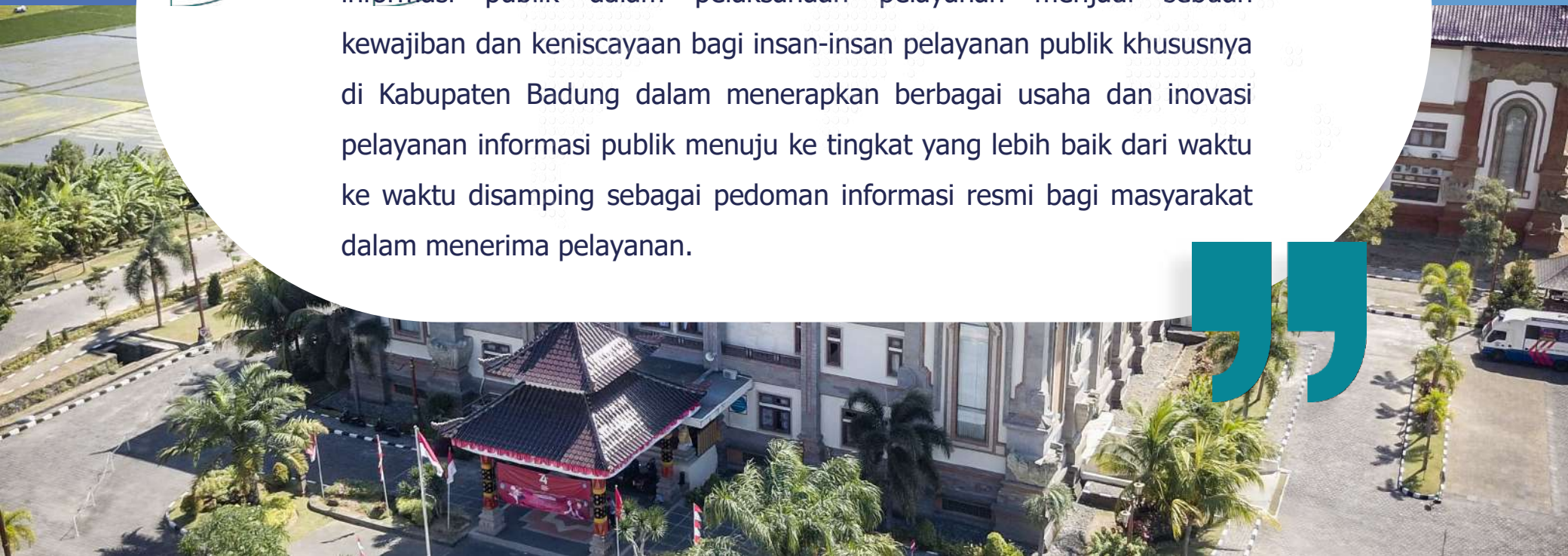

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BEST PRACTICE

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

03
LANTAI 3
RUANG BACK OFFICE
DAN RUANG RAPAT
02
LANTAI 2
RUANG KADIS DPMPTSP
KABUPATEN BADUNG
DAN BACK OFFICE
01
LANTAI 1
RUANG MPP
FRONT OFFICE MALL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN BADUNG
GEDUNG MPP
KABUPATEN BADUNG

Sekretaris Daerah Kab.Badung, I Wayan Adi Arnawa, SH

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

DASAR HUKUM

MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG

1. PERATURAN MENTERI PAN & RB NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
2. KEPUTUSAN MENTERI PAN & RB NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
3. PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG MAL PELAYANAN PULIK KABUPATEN BADUNG
4. PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI BADUNG KEPADA KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BADUNG
5. PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE

TUJUAN DIBENTUKNYA MPP

Memperpendek proses pelayanan

Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

Meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

BADAN LAYANAN PUBLIK / BUMN / BUMD / SWASTA :

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar.
2. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar.
3. Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Bali.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung.
5. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Denpasar Gatot Subroto.
6. PT. Garuda Indonesia (PERSERO) TBK
7. PT. PLN (PERSERO) distribusi Bali
8. PT. Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Denpasar
9. PT. Pos Indonesia (Persero)
10. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bali

KEMENTERIAN / LEMBAGA :

- **Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.**

1. KPP Pratama Badung Utara
2. KPP Pratama Badung Selatan

- **Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan HAM.**

3. Divisi Imigrasi
4. Divisi Pelayanan Hukum
5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Denpasar.
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Badung.
7. Kejaksaan Negeri Badung.
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
9. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung.

PEMKAB BADUNG :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
2. Badan Pendapatan Daerah / Pesedahan Agung Kabupaten Badung.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.

PERUBAHAN PARADIGMA
PELAYANAN PUBLIK

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

1 ***Mind-set, culture-set & behavior-set***
Perubahan pola pikir, budaya kerja dan sikap/prilaku.

2 ***Integritas Kerja***
Nilai-nilai yang dianut oleh Pemimpin (*values*) konsistensi dan komitmen yang membentuk kepercayaan (*trust*)

3 ***Akuntabalitis***
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja petugas layanan.

4 ***Manajemen Perubahan***
Pengorganisasian Tata Laksana, Regulasi, SDM, Sarana Prasarana, *Outcome*, dan Pengawasan dengan konsep *Total Quality Management (TQM)*

PRIORITAS AREA PERUBAHAN PELAYANAN DPMPTSP

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

REGULASI

Menyusun produk hukum baru sebagai pedoman pelayanan.

Review terhadap produk hukum yang tumpang tindih.

Perubahan / Pencabutan produk hukum yang sudah tidak sesuai kondisi kekinian.

MANAJEMEN

Pengorganisasian PD agar berfungsi optimal

Tatalaksana pelayanan meliputi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terstruktur dan sesuai prinsip-prinsip *good governonce.*

Mengembangkan inovasi pelayanan.

SDM APARATUR

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja petugas layanan.

Perubahan Mind-set, Culture-set dan Behavior-set menuju aparatur yang berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi.

SARANA PRASARANA

Ruang Pelayanan : Loket, Lounge, Booth, Pengaduan, Laktasi dll.

Sarana pendukung : PC, Laptop, I-pad, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy, Faxcimile, Kios-K, Monitor, Mesin antrian, dll

Jaringan : Internet, Call Centre, Telepon dan Listrik.

7 PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG

7 TIPE PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG

1. PELAYANAN LANGSUNG (*DIRECT SERVICE*) OLEH PETUGAS DARI MASING-MASING INSTANSI.
2. PELAYANAN BERBANTUAN (*ASSISTED SERVICE*) LAYANAN BERBANTUAN OLEH PETUGAS PADA *LOUNGE* MPP BADUNG.
3. PELAYANAN MANDIRI (*SELF SERVICES*) OLEH MASYARAKAT / BADAN USAHA BERUPA PELAYANAN PERIZINAN USAHA DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS.
4. PELAYANAN KELILING (*MOBILE SERVICES*) PELAYANAN JEMPUT BOLA OLEH PETUGAS LAYANAN RIBON (REGU IZIN BERMOTOR ONLINE)
5. PELAYANAN ELEKTRONIK (*E- SERVICES*) MELIPUTI : LAYANAN PERIZINAN ONLINE (LAPERON), LAYANAN PERPAJAKAN, LAYANAN KEIMIGRASIAN, LAYANAN SIM, LAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN SERTA LAYANAN BPJS KESEHATAN;
6. PELAYANAN CEPAT (*QUICK SERVICES*) MELIPUTI : LAYANAN TICKETING DAN *CITY CECK-IN* DARI PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) SERTA LAYANAN IZIN PENELITIAN.
7. LAYANAN PRIORITAS (*PRIORITY SERVICE*) MERUPAKAN LAYANAN BAGI PENANAM MODAL SKALA MENENGAH - BESAR YANG AKAN BERINVESTASI

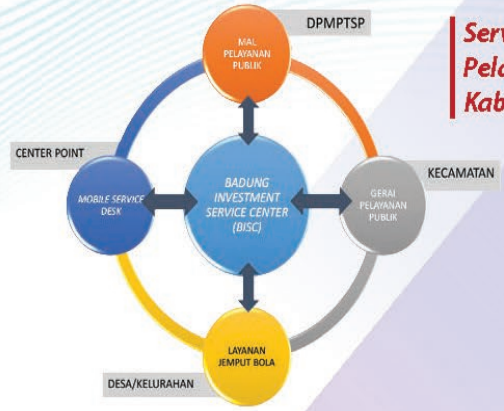

Service Point Pelayanan Publik Kabupaten Badung

PENYELENGGARAAN PELAYANAN SECARA TERINTEGRASI :

NOMOR ANTRIAN
1 Mesin antrian untuk keseluruhan Layanan pada MPP.

ALUR BISNIS PROSES
Terdapat standar prosedur yang jelas pada penyelenggaraan pelayanan di masing-masing loket / booth.

PEMBAYARAN ONLINE
Melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk dapat dilaksanakan dengan transfer online.

PENGAMBILAN DOKUMEN
Dilaksanakan pada loket khusus pengambilan Izin.

PENGIRIMIN TEMBUSAN IZIN
Dilaksankan secara Elektronik kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pembinaan dan pengendalian.

PENGADUAN
Terintegritas melalui call center 1500 - 273, Infinity Omni Chanel, SP4N, SIAP LAPOR, dan Media Sosial.

10 PENUNJANG PELAYANAN PADA
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BADUNG

BIGOSS & WEBSITE SINGLE PAGE

LAPERON

RIBON

UNIT DESIGN ARSITEKTUR GRATIS

ANTRIAN ONLINE

SIAP LAPOR

ESTIMATOR IMB

PEMBAYARAN RETRIBUSI / PAJAK IZIN ONLINE

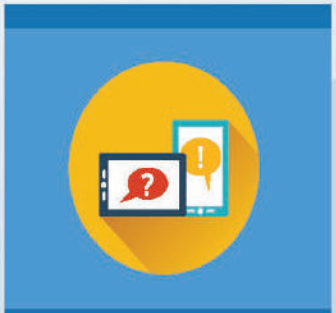

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK

LAYANAN INFO MEDIA ONLINE

CALL CENTER 1500 - 273

MAL
PELAYANAN
PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

JUMLAH KUNJUNGAN

KUNJUNGAN DINAS

JUMLAH KUNJUNGAN DINAS PADA MPP BADUNG
MULAI SEPTEMBER 2018 S/D PEBRUARI 2020
TOTAL : **173 ROMBONGAN INSTANSI**

TERDIRI DARI :

PEMERINTAH PUSAT	28
PEMERINTAH DAERAH	141
ORGANISASI LAIN	4

KUNJUNGAN
WAKIL DUBES INGGRIS
KE MPP BADUNG

PROSES PELAYANAN
PADA KEMENKUMHAM
DEVISI IMIGRASI

KUNJUNGAN MASYARAKAT

TOTAL JUMLAH PELAYANAN	163.299
RATA-RATA PELAYANAN PERBULAN	12.561
RATA-RATA PELAYANAN PERHARI	718

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

UT PENYELENGGARAAN MPP BADUNG

NO	URAIAN	AWAL	SEKARANG	KETERANGAN
1	JUMLAH INSTANSI YANG BERGABUNG PADA MPP BADUNG (INSTANSI)	24	27	PENAMBAHAN PT. POS INDONESIA, PT. TASPEN (PERSERO) DAN BNN BADUNG
2	JUMLAH LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN PADA MPP BADUNG (JENIS)	121	145	PENAMBAHAN JUMLAH LAYANAN DARI, PERLUASAN LAYANAN
3	RATA-RATA LAYANAN PERHARI (ORANG/HARI)	167	586	TERDAPAT KENAIKAN RATA-RATA 251% PENGGUNA LAYANAN MPP PER HARI
4	JUMLAH KUNJUNGAN KERJA KE MPP BADUNG (ROMBONGAN/BULAN)	2	13	TOTAL KUNJUNGAN S/D DESEMBER 2019 SEBANYAK 163 ROMBONGAN
5	PREDIKAT PELAYANAN	A-	A	PELAYANAN PRIMA
6	ZONA INTEGRITAS	BELUM WBK	WBK	WILAYAH BEBAS KORUPSI
7	SISTEM MANAJEMEN MUTU	BELUM ISO	SUDAH ISO	SMM ISO 9001 : 2015
8	SISTEM PELAYANAN	MANUAL	ONLINE	122 IZIN ONLINE
9	PRODUK PELAYANAN (OUTPUT)	BELUM SELURUH LAYANAN	BELUM SELURUH LAYANAN	SEBAGIAN MASIH BERUPA INFORMASI LAYANAN

INDEKS KEUPUASAN MASYARAKAT

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

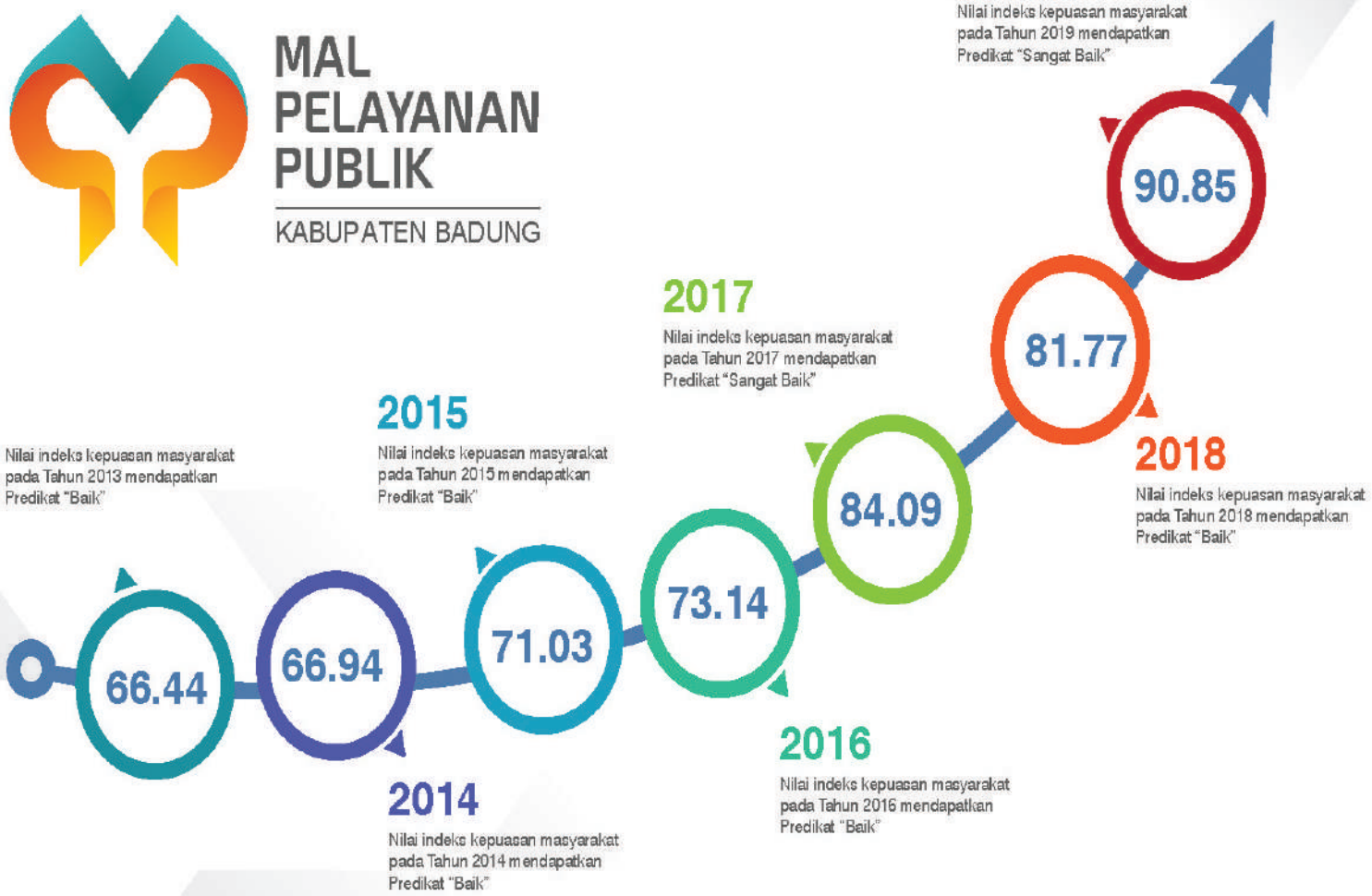

Rencana Pengembangan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

Penambahan Instansi dan jenis Layanan

- BEA CUKAI
- PT. Taspen (Persero)
- PT. Pegadaian (Persero)
- PT. Telkom (Persero)
- Samsat Kendaraan
- Notaris
- Klinik Kesehatan
- dll

Integrasi OSS dengan LAPERON

- Mengintegrasikan sistem OSS dengan Layanan Perizinan online (LAPERON) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Integrasi LAPERON dengan Badung Command Center

- Mengintegrasikan data Base pada Badung Command Center dengan Layanan Perizinan online (LAPERON).

Layanan Integrasi Perizinan dan Modal Usaha (I-MODUS)

- Izin dan modal usaha untuk UMKM .
  Izin dan modal usaha untuk usaha Online.

ALUR PERMOHONAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BADUNG

PEMOHON INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada badan publik baik langsung ataupun melalui surat elektronik

PEMOHON INFORMASI MENGISI FORMULIR

Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan menyebutkan nama, alamat, nomor telepon, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaian informasi, serta melampirkan fotokopi kartu identitas/Akta Pendirian

PETUGAS PPID MEMERIKSA INFORMASI

Petugas PPID menerima dan memeriksa permohonan informasi. Permohonan informasi yang memenuhi persyaratan dan bukan termasuk informasi yang dikecualikan akan diberikan tindak lanjut berupa nomor registrasi pendaftaran informasi publik dan memberikan salinan formulir permohonan Informasi Publik kepada Pemohon

KOORDINASI PPID

PPID melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu dalam memenuhi permohonan informasi

PENYAMPAIAN INFORMASI

Petugas PPID menyampaikan informasi sesuai permohonan kepada pemohon informasi

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

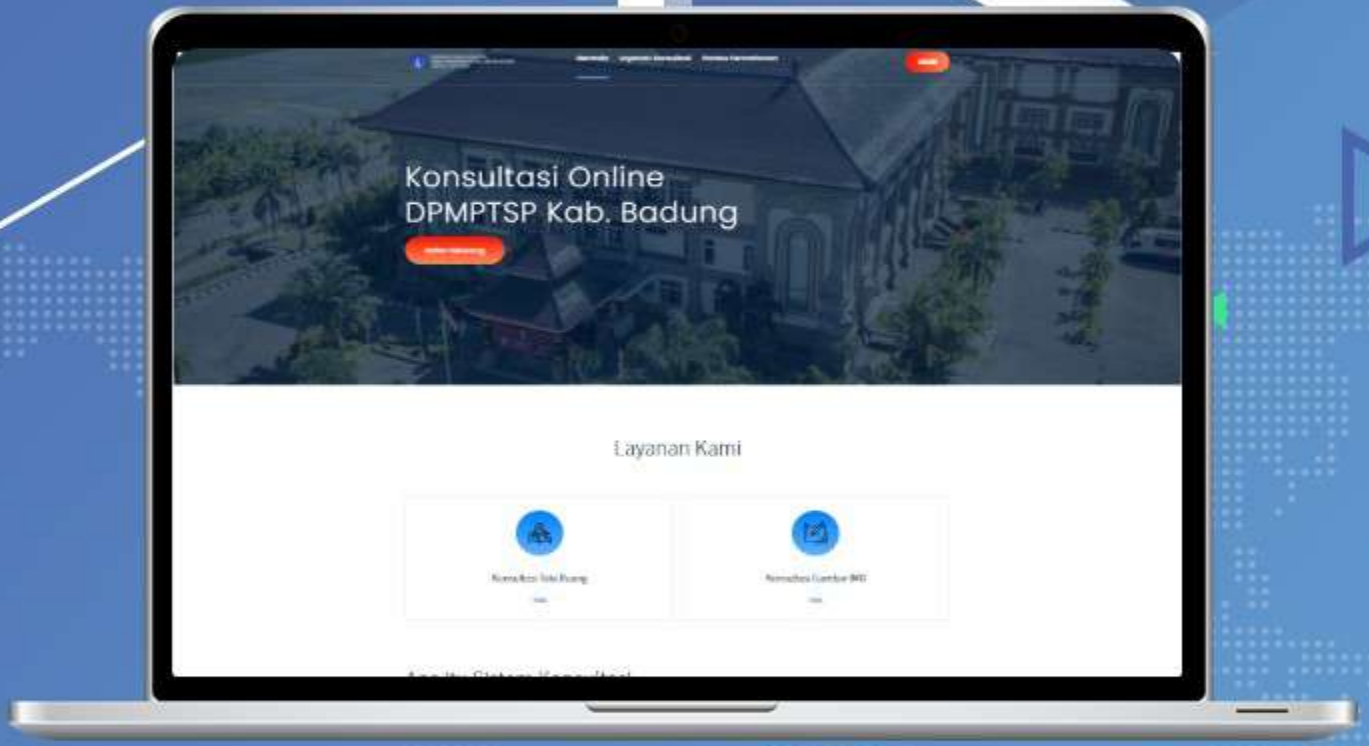

SISTEM KONSULTASI ONLINE DPMPTSP KABUPATEN BADUNG

Apa Itu Sistem Konsultasi Online DPMPTSP Kabupaten Badung ?

Sistem ini kami kembangkan guna mempermudah masyarakat untuk melakukan konsultasi gambar IMB dan Tata Ruang secara online tanpa perlu datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Badung. Semua proses pendaftaran dan verifikasi berkas dan persetujuan gambar IMB oleh petugas kami dilakukan secara online melalui sistem konsultasi.

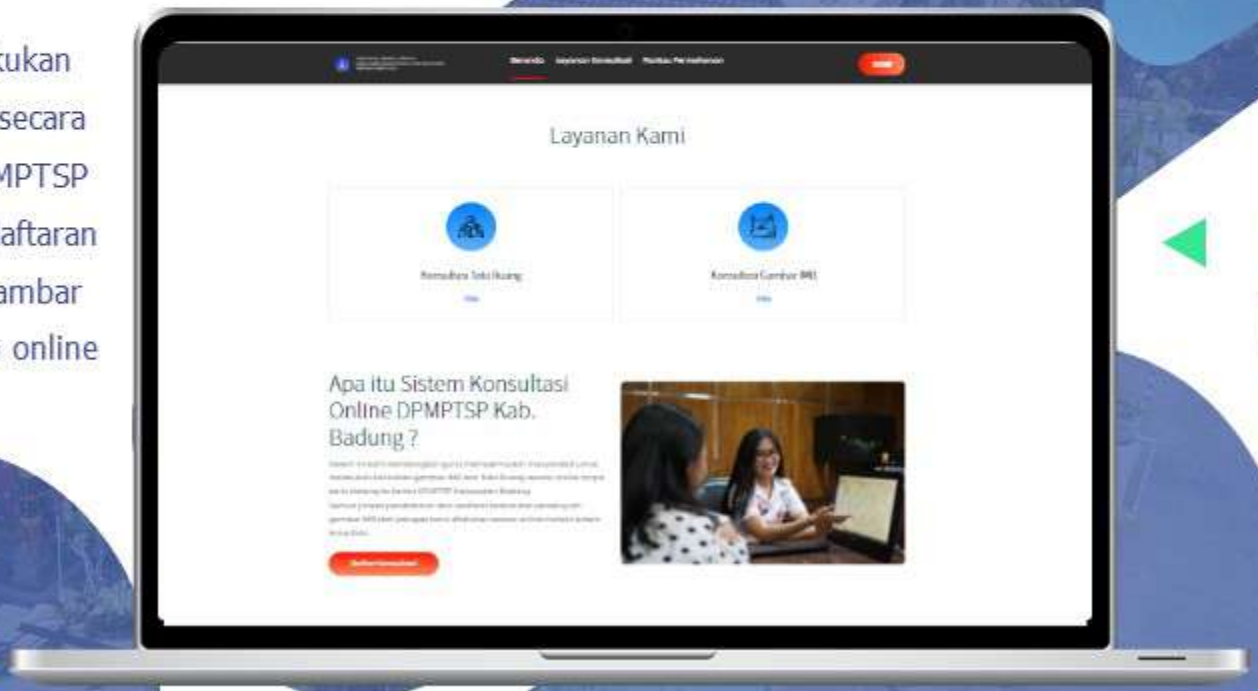

LAYANAN KONSULTASI

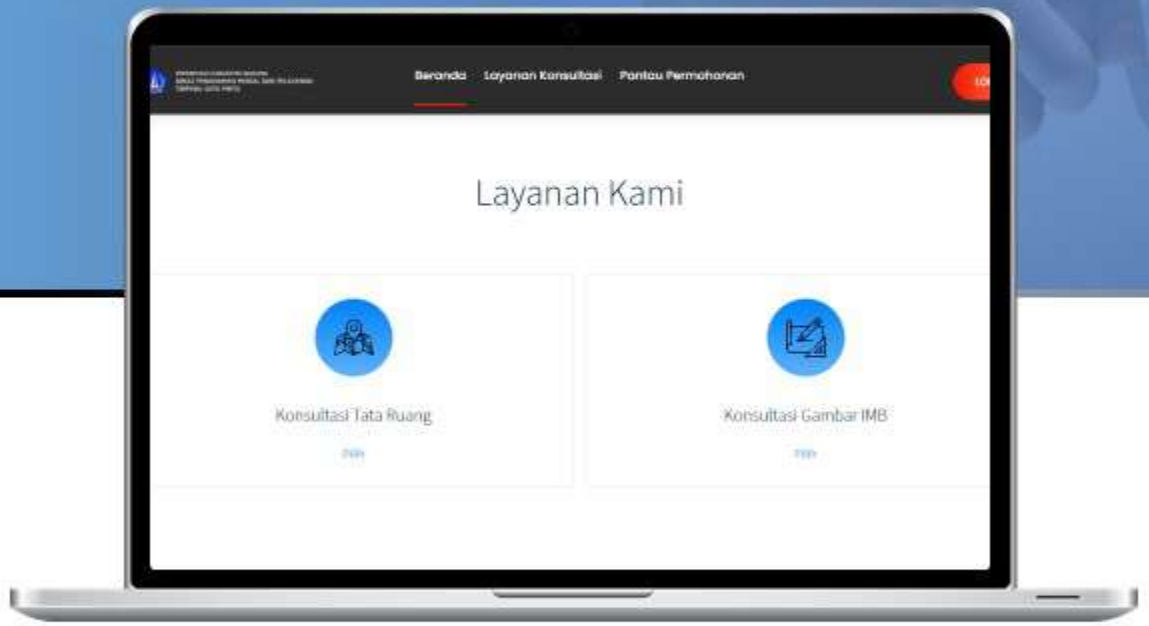

Konsultasi Tata Ruang

Konsultasi Gambar IMB

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

PENDAFTARAN KONSULTASI TATA RUANG ONLINE DPMPTSP KAB.BADUNG

Pemohon

Pemohon Melakukan Pengajuan Permohonan Melalui Website : konsultasi.laperon.badungkab.go.id

Petugas Melakukan Pengecekan Konsultasi

Kawasan Ditemukan

Konsultasi Selesai, Pemohon Dapat Mendownload Hasil Konsultasi

Kawasan Tidak Ditemukan

Permohonan dikembalikan dan disarankan mengajukan permohonan tersebut secara resmi melalui laperon untuk cek lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

PENDAFTARAN KONSULTASI GAMBAR IMB ONLINE DPMPTSP KAB.BADUNG

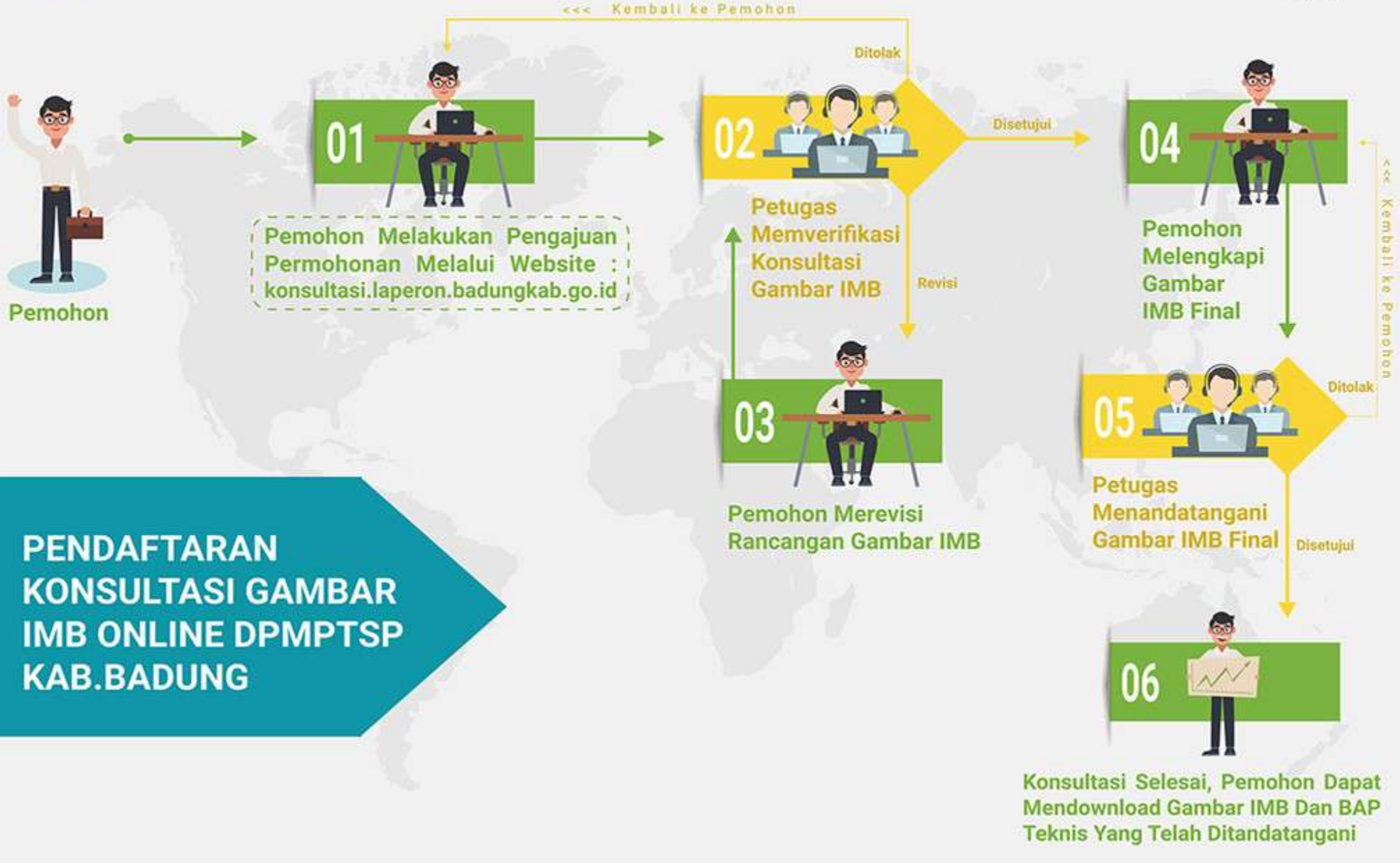

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

LAPERON

Layanan Perizinan Online Kabupaten Badung

TRANSFORMASI MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, TEPAT DAN TRANSPARAN

LAPERON
Layanan Perizinan Online

LOGO LAPERON

1

Huruf L

Pada LAPERON merupakan huruf pertama dari kata LAPERON

2

Gambar Sinyal (WI-FI)

Memiliki arti memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perizinan dan non perizinan secara online

3

Warna Logo LAPERON

Warna merah pada sinyal terkecil merepresentasikan layer fisik Laperon dengan dukungan perangkat keras dan jaringan fisik yang handal. Warna Biru Muda dan Biru Tua pada warna sinyal melambangkan pelayanan pada layer aplikasi dengan sifatnya yang berjenjang, kemampuan akses yang maksimal, menjangkau seluruh lapisan masyarakat

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Tampilan Dashboard Laperon

Latar Belakang

Aplikasi LAPERON (Layanan Perizinan Online) merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang bertujuan untuk wujudkan tata kelola pemerintahan di bidang pelayanan perizinan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Jenis pelayanan perizinan yang dilayani di LAPERON merupakan seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 dimana terdapat 185 jenis perizinan dan non perizinan.

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Komponen Penunjang Operasional Sistem

HARDWARE

Server, Jaringan Internet,

PC, Printer, dll

SOFTWARE

Laperon, Digof, Antrian Online, Konsultasi Online, dll

SUMBER DAYA MANUSIA

Tim Programmer, Tim Ahli Jaringan,

Tim Ahli Server

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Secara Online.
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 81 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 81);

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Tujuan Layanan LAPERON

1. Kemudahan akses terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di kabupaten badung

2. Transformasi pola pelayanan dari pola konvensional menuju pola online

3. Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan transparansi dalam pelayanan perizinan.

4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan perizinan di kabupaten badung

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Keunggulan LAPERON

1. Pendaftaran Online
2. Antrean Online
3. Pemantauan proses (tracking system)
4. Pembayaran Online/Non Tunai/M-Banking
5. Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. SMS Notifikasi (SMS Gateway)
7. Pengecekan Peruntukan Tata Ruang
8. Konsultasi IMB Online

9. Konsultasi Tata Ruang Online
10. Koresponden Online
11. Pesan Pengaduan Online
12. Delivery Izin Real Time
13. Layanan Mobile System dengan Android Smartphone
14. Integrasi dengan OPD terkait
15. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Online
16. Pembayaran QRIS

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Manfaat LAPERON

E-PUBLIC SERVICES

LAYANAN PERIZINAN ONLINE (LAPERON) KABUPATEN BADUNG MEMBERI SOLUSI PERIZINAN ANDA MENUJU PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

- Mengurangi penggunaan Calo
- Izin Terbit Secara Real-Time
- Menghindari Pemalsuan Izin dengan QR Code
- Dapat di akses dari manapun melalui portal LAPERON
- Transparan dan Akuntabel
- Kinerja Petugas dapat dipantau dengan mudah

ALUR LAYANAN PERIZINAN ONLINE (LAPERON)
KABUPATEN BADUNG

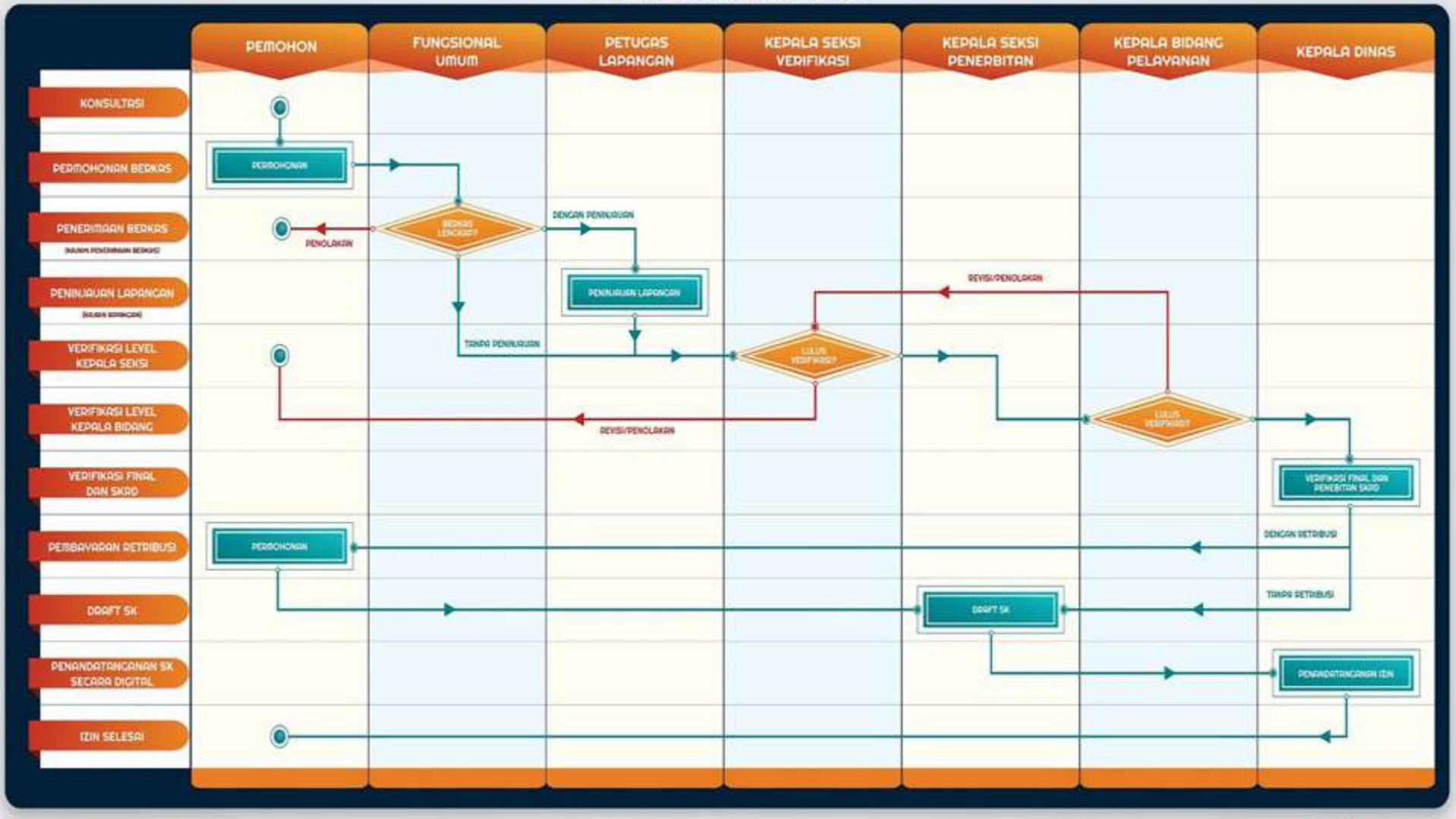

LAPERON
LAYANAN PERIZINAN ONLINE
KABUPATEN BADUNG

https://laperon.badungkab.go.id

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN BADUNG

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Inovasi Laperon

Konsultasi Tata Ruang

Merupakan Inovasi Layanan yang memudahkan pemohon untuk mengetahui peruntukan lokasi atau kawasan anda secara mandiri.

Survei Kepuasan Masyarakat

Merupakan Inovasi Layanan untuk pemohon dan masyarakat memberikan penilaian dan masukan terkait layanan yang tersedia pada laperon

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Layanan Pengaduan

Merupakan Inovasi Layanan yang memberikan kemudahan kepada pemohon untuk memberikan laporan, serta kritik dan saran terkait pelayanan yang ada pada Laperon

SMS Notifikasi

Merupakan Inovasi Layanan yang memberikan Notifikasi Informasi terkait proses permohonan pada Laperon yang diajukan oleh pemohon seperti permohonan izin sedang diajukan, izin terbit, dan sebagainya

Target Kinerja Pegawai

Merupakan Inovasi Layanan Untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam verifikasi izin, maka kami memberikan target disposisi untuk masing-masing pegawai dalam melaksanakan verifikasi berkas. Jika pegawai tidak memenuhi target dalam waktu itu, maka berkas akan otomatis naik ke tingkat atas

LAPERON
Layanan Perizinan Online

FIFO

First In First Out (FIFO) merupakan Inovasi Layanan untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan perizinan, kami menerapkan fitur dengan tujuan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun yaitu pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan perizinan, dapat dilayani terlebih dahulu

Permohonan Prioritas

Inovasi Layanan untuk permohonan dengan nilai investasi diatas 10 Milyar, akan mendapatkan prioritas perlayanan perizinan

Informasi Jadwal Survey Lapangan

Informasi Jadwal Survey Lapangan merupakan fitur dimana memudahkan petugas lapangan dalam penentuan dan pengaturan jadwal survey serta memudahkan pejabat untuk memonitoring jadwal survey lapangan

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Anjungan Mandiri Cetak Izin Online

Masyarakat dapat mencetak izin online secara mandiri pada Lounge Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung

app.laperon.badungkab.go.id

LAPERON
Layanan Perizinan Online

TANDA TANGAN ELEKTRONIK & QR CODE

Dengan adanya di implementasikannya TTE dan QR Code maka izin akan terbit secara realtime dapat di unduh secara langsung oleh pemohon.

Untuk menjaga validitas data izin yang terbit dan menghindari pemalsuan data izin, kami telah bekerjasama dengan BSrE(Balai Sertifikasi Elektronik) perihal penerbitan izin menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan ditambahkan dengan QR Code (Quick Response Code) yang unik sehingga data izin sangat sulit untuk dipalsukan.

LAPERON
Layanan Perizinan Online

INTEGRASI SISTEM LAPERON

BADUNG COMMAND CENTER

Integrasi Data Perizinan dan Non Perizinan untuk keperluan Data Warehouse

INSTANSI TERKAIT

Integrasi tembusan izin secara online

INDOSAT

Integrasi dalam hal penyediaan layanan sms gateway

BPD BALI

Integrasi pembayaran retribusi IMB dan SIUPMB

BAPENDA

Integrasi izin persetujuan penyelenggaraan reklame dan izin reklame

DISDUKCAPIL

Integrasi Data KTP Elektronik

LAPERON
Layanan Perizinan Online

HINDARI CALO DENGAN VERIFIKASI DATA DAN FOTO DIRI

LAPERON
Layanan Perizinan Online

PEMBAYARAN DENGAN QR (QRIS)

UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

FITUR INI MASIH DALAM TAHAP PENGEMBANGAN

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Izin Online LAPERON

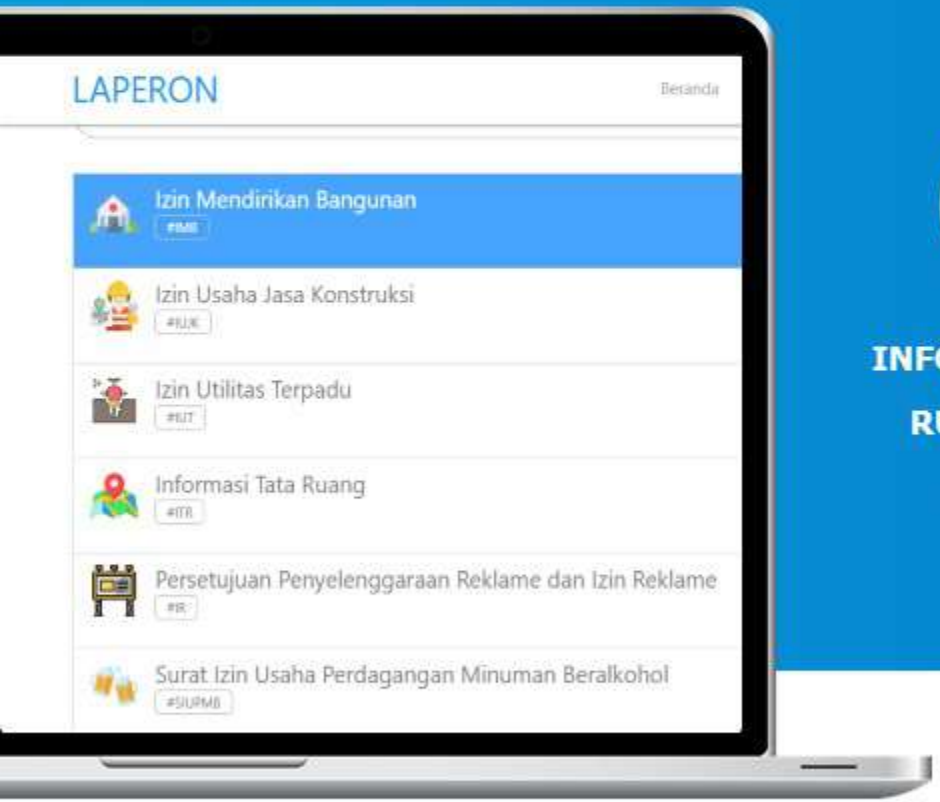

INFORMASI TATA RUANG (ITR) ONLINE

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA ONLINE

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ONLINE

TOTAL IZIN DAN NON IZIN ONLINE : 185 JENIS

LAPERON
Layanan Perizinan Online

KETERBUKAAN INFORMASI DI LAPERON

Pemohon bisa liat syarat

Chat dengan petugas

Tracking permohonan

Izin realtime

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Permohonan Masuk Laperon dari Bulan Agustus – Bulan Desember 2018

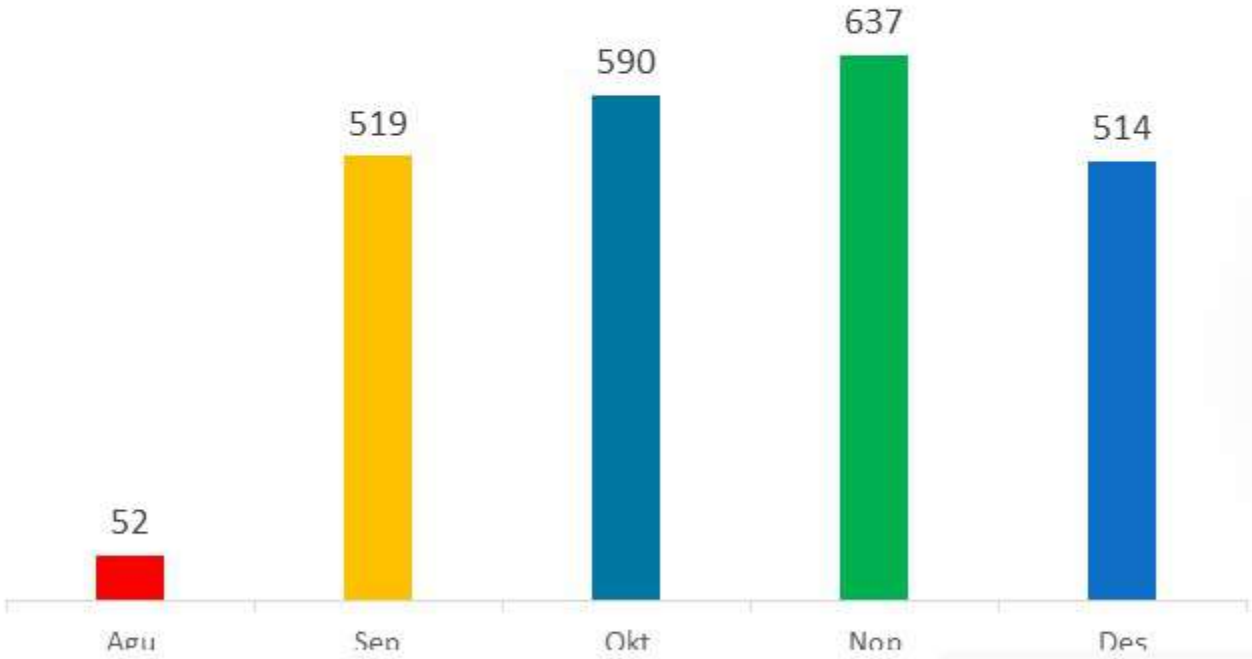

Total Permohonan Masuk Laperon Tahun 2018 :

2.312

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Permohonan Masuk
Laperon dari Bulan Januari – Bulan Desember 2019

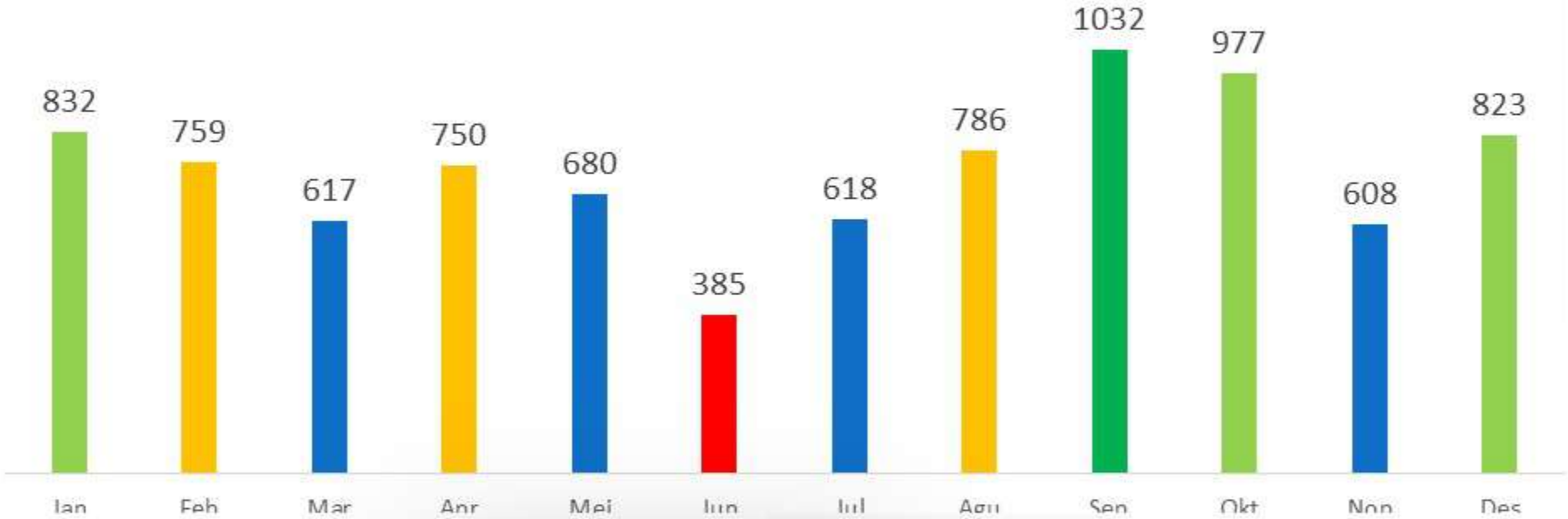

Total Permohonan Masuk Laperon Tahun 2019 :

8.867

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Permohonan Masuk
Laperon dari Bulan Januari – Bulan September 2020

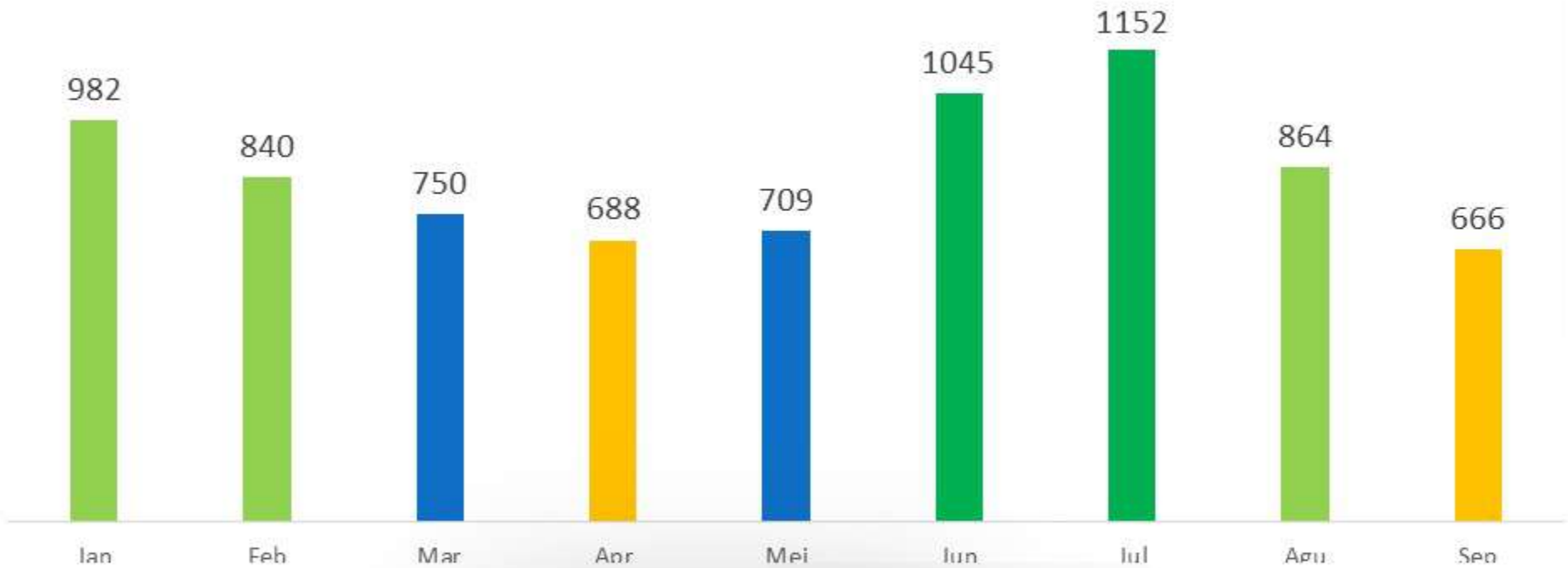

Total Permohonan Masuk Laperon Tahun 2019 :

7.696

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Rating Permohonan Laperon 2019

Berikut ini adalah rata-rata dari Rating Permohonan yang ada pada Laperon tahun 2019 adalah sebagai berikut :

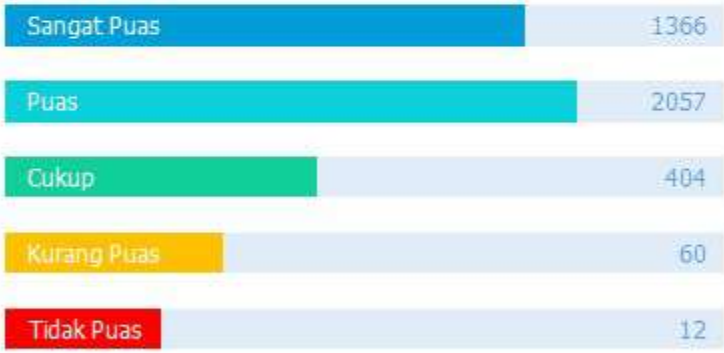

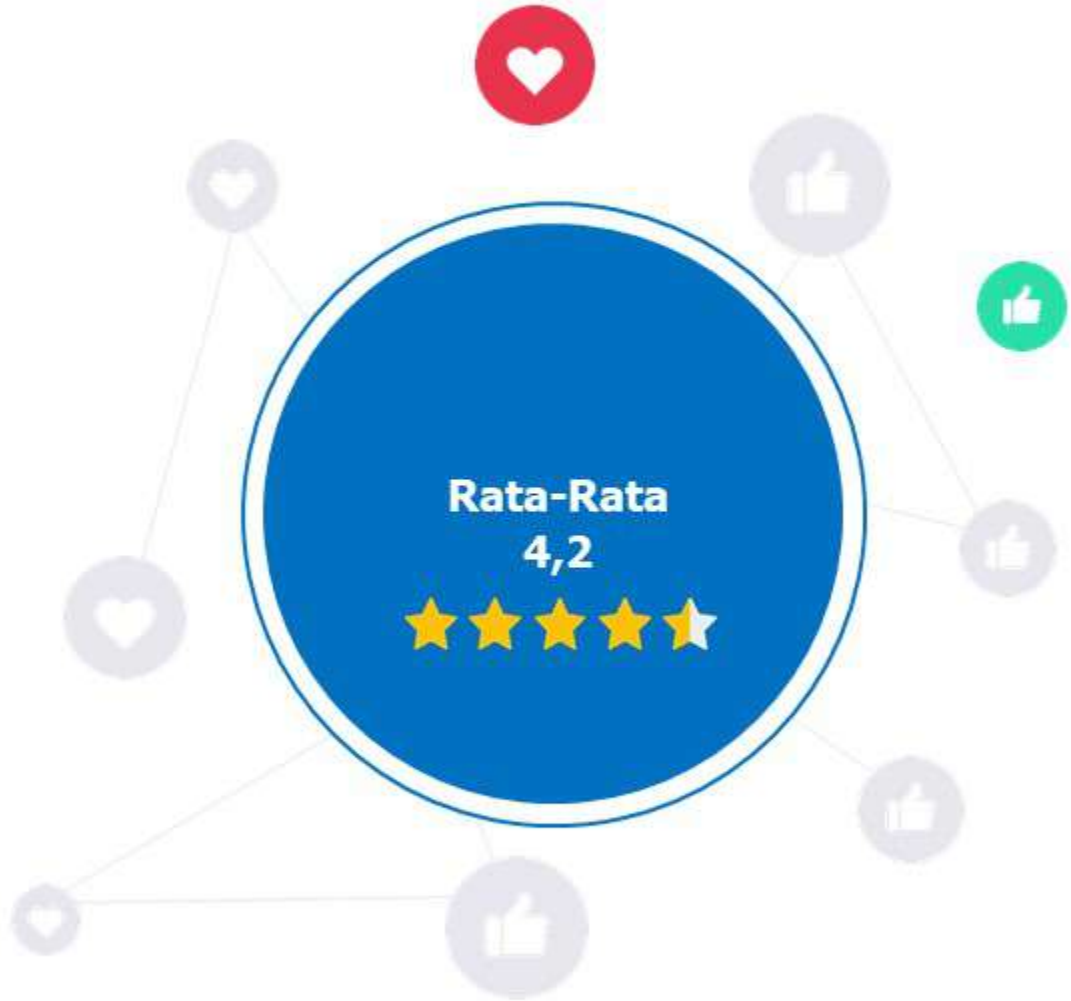

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Rating Permohonan Laperon 2020

Berikut ini adalah rata-rata dari Rating Permohonan yang ada pada Laperon tahun 2020 adalah sebagai berikut :

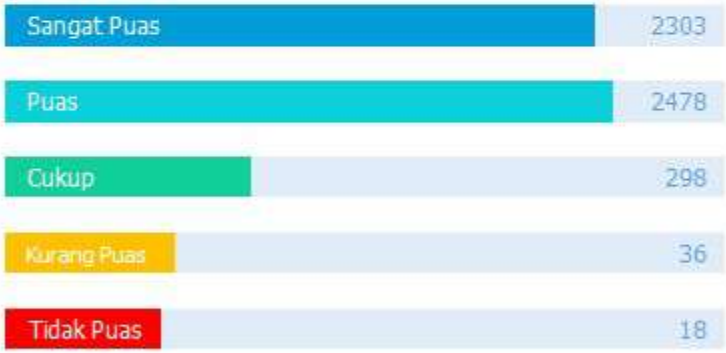

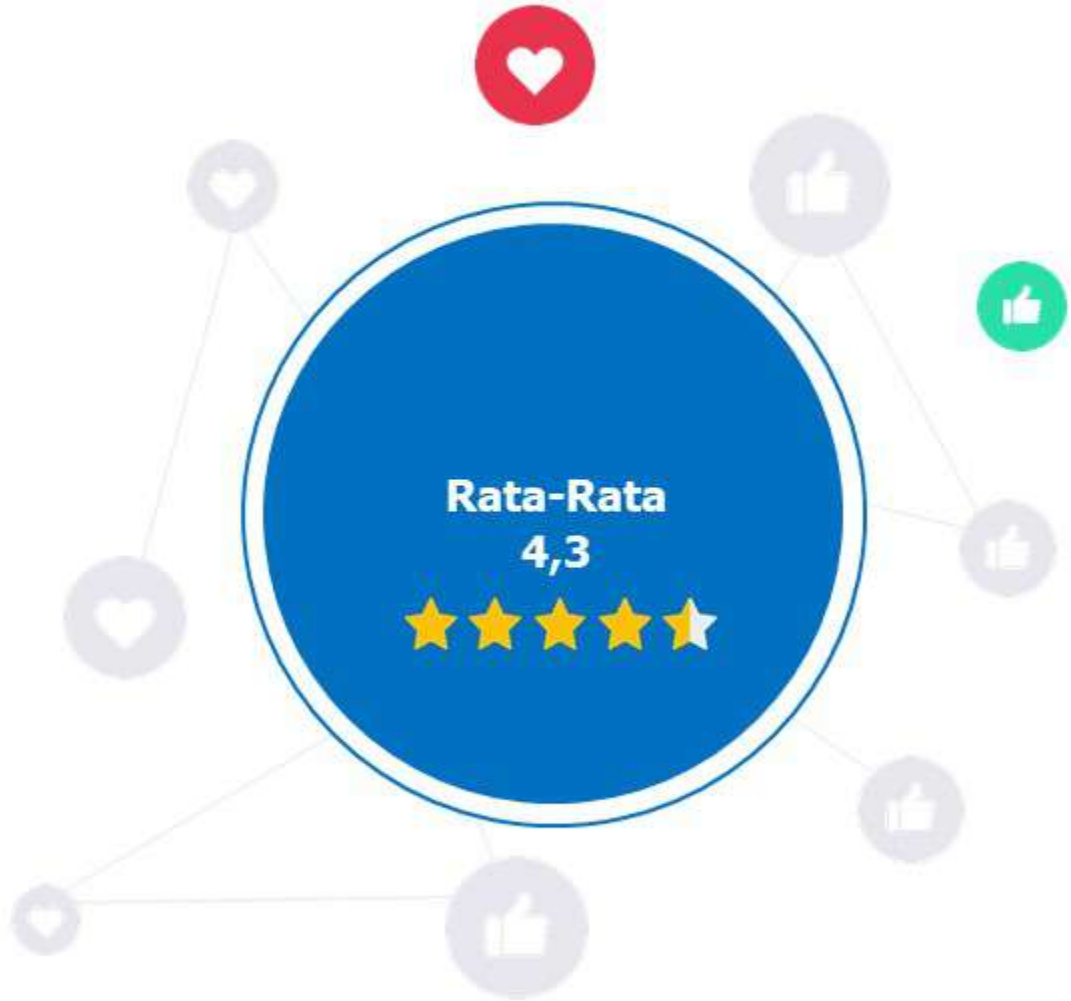

LAPERON
Layanan Perizinan Online

Statistik Permohonan

Dari Awal Agustus 2018 – Akhir September 2020

Jumlah Pemohon

9,075

Total Permohonan

19,192

Dalam Proses

1,707

Izin Selesai

12,704

INFORMASI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, saat ini hampir seluruh K/L dan Pemerintah Daerah telah memiliki halaman web dan media sosial untuk menyampaikan berbagai kebijakan, informasi resmi untuk publik, inovasi dan capaian-capaian nya kepada masyarakat. Oleh karena demikian, peran media sosial menjadi sangat sentral dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada publik.

INFORMASI PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

DPMPTSP Kabupaten Badung sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung, memiliki media sosial untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat diantaranya Facebook, Instagram, Twitter serta Youtube.

@dpmptspbadung

@dpmptspbadungkab

@dpmptspbadung

DPMPTSP Kabupaten Badung

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

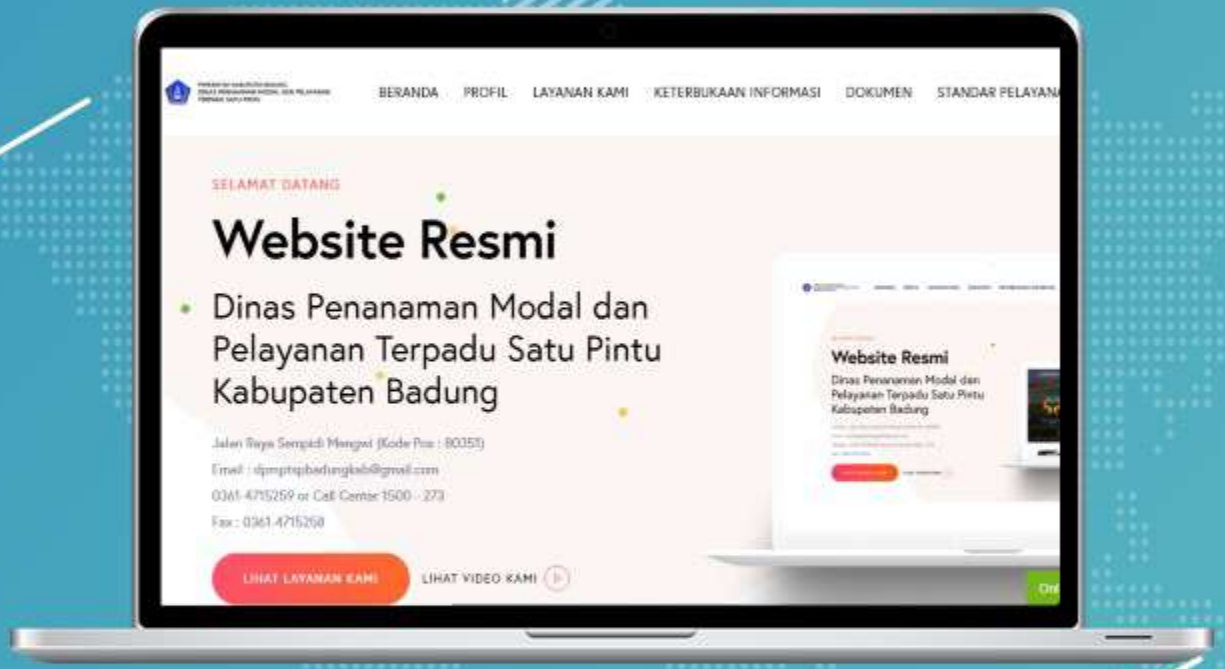

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Tampilan Dashboard

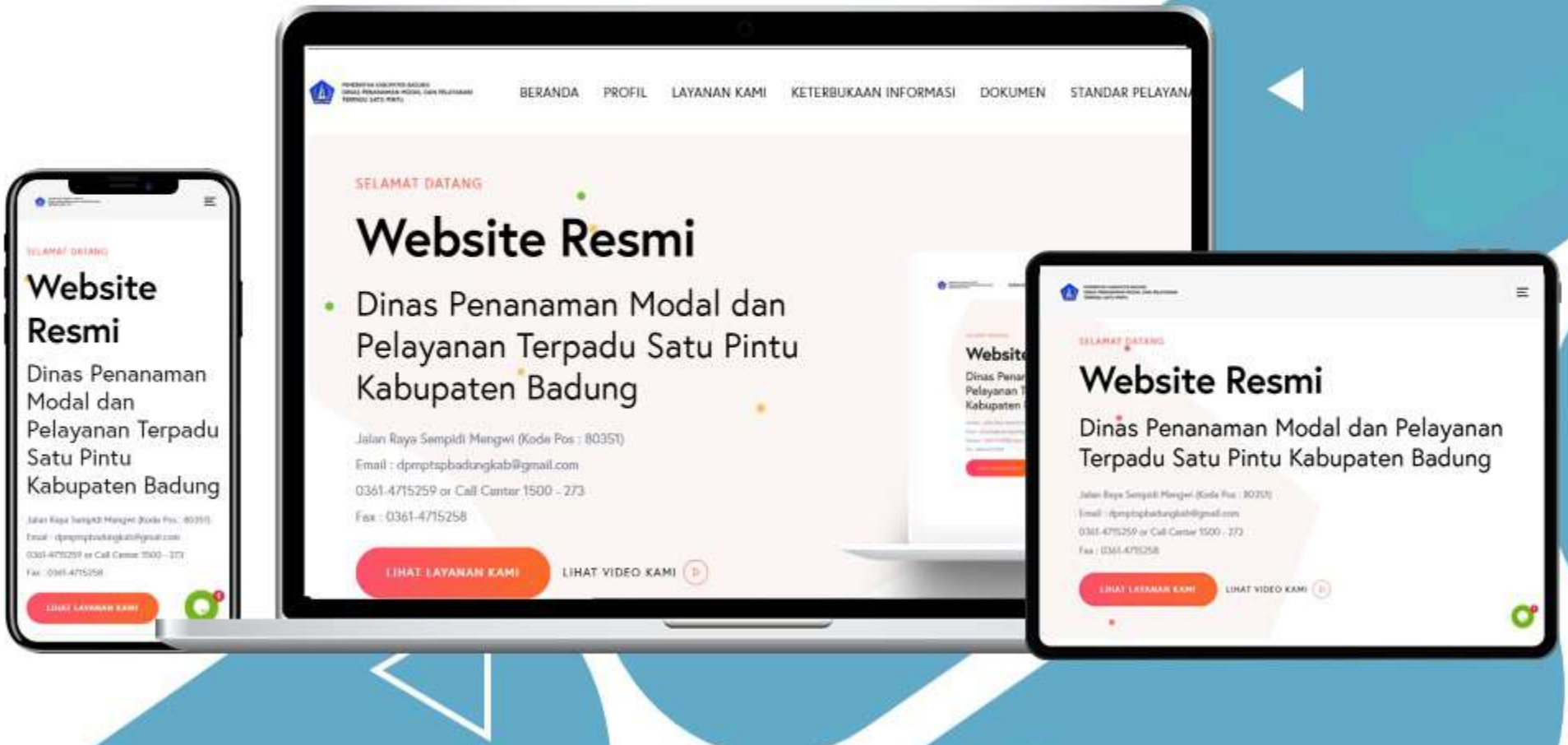

TENTANG DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupxaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang URAIAN TUGAS DINAS DAERAH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

Layanan DPMPTSP

Perizinan

Terdapat 122 jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung yang seluruhnya kami layani secara online melalui LAPERON dan OSS untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan.

Penanaman Modal

"There no (economic) growth without invesment", kami membentuk BISC dengan tugas utama memfasilitasi para penanam modal yang berminat investasi di Kabupaten Badung.

Mall Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik merupakan layanan terintegrasi satu pintu dimana terdapat berbagai layanan dari Instansi Pemerintah, BUMN maupun Pihak Swasta yang berada dalam satu gedung yang terintegrasi.

Inovasi Pelayanan DPMPTSP

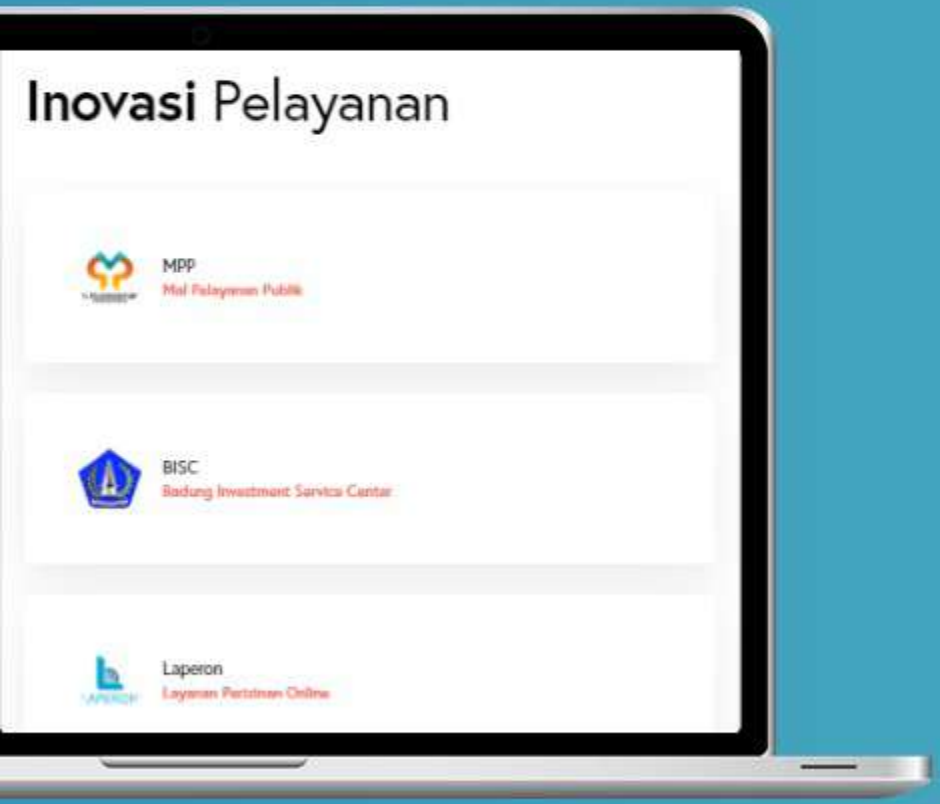

MPP

Mall Pelayanan Publik

Laperon

Layanan Perizinan Online

Konsultasi Online

Konsultasi IMB & ITR secara Online

BISC

Badung Investment Service Center

OSS

Online Single Submission

Tata Ruang Online

Pengecekan Kawasan Tata Ruang secara Online

Antrian Online

Layanan pengambilan nomor antrian secara online

Estimator IMB

Estimator IMB secara Online

Siap Lapor

Sistem Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi

KETERBUKAAN INFORMASI

BERITA TERKINI

INFORMASI ANGGARAN

PENGUMUMAN

PPID KOMINFO

GALERI FOTO & VIDEO

PERMOHONAN INFORMASI PPID

INFORMASI PERIZINAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

BERITA TERKINI

Berita-berita terkini dari kegiatan atau event pada DPMPTSP Kabupaten Badung. Ada berbagai kategori berita seperti Hot News, Perizinan, Pelayanan Publik, dan lainnya.

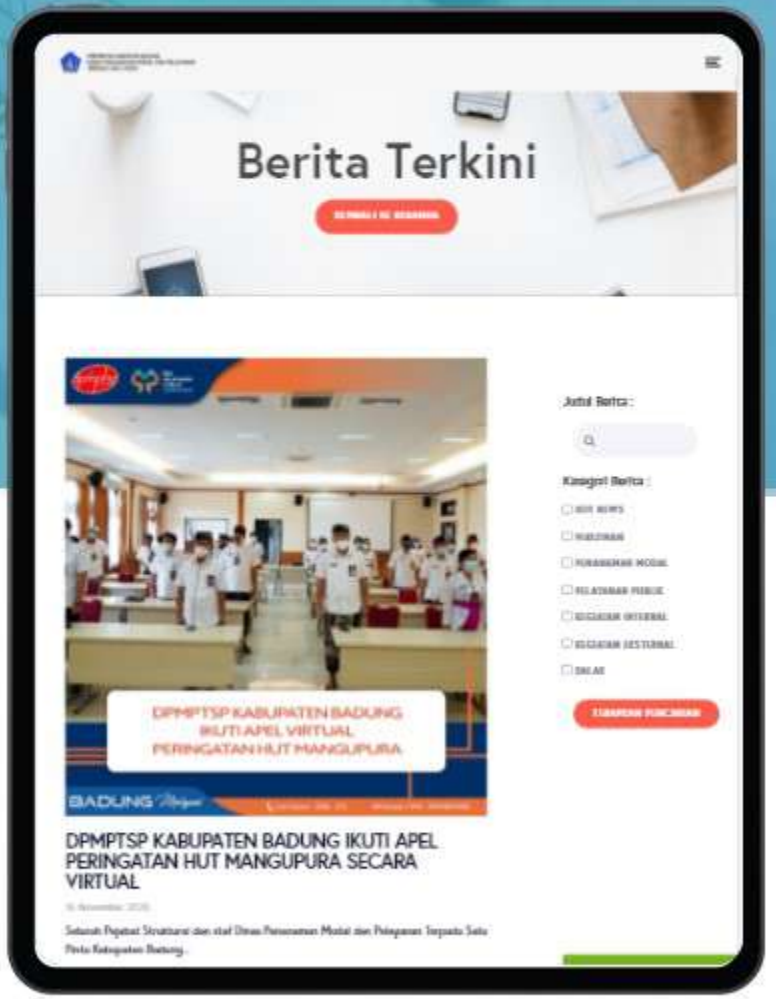

PENGUMUMAN TERKINI

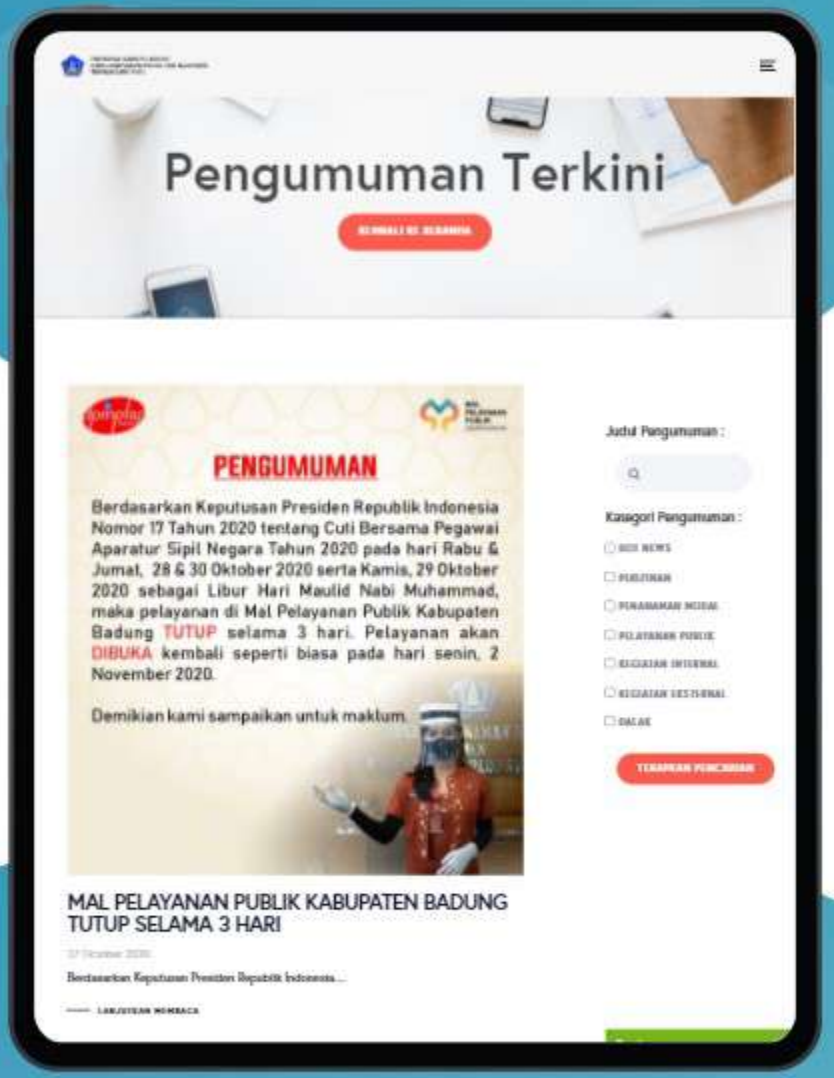

Terdapat pengumuman penting untuk masyarakat mengenai pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Badung

GALERI

Koleksi Album berupa foto-foto dan video terkait kegiatan di DPMPTSP Kabupaten Badung

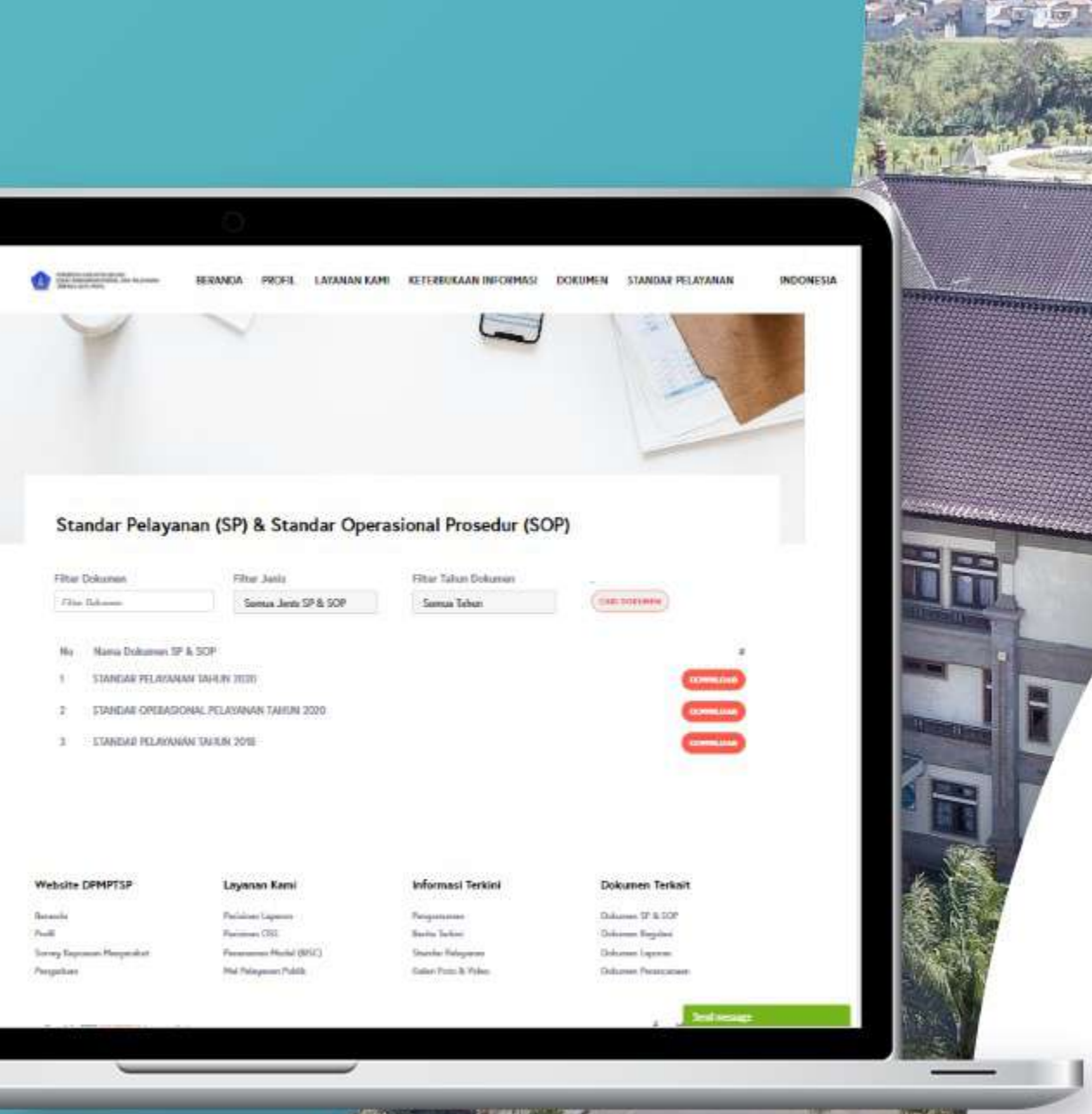

SP & SOP

Dokumen mengenai Standar Pelayanan (SP) & Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat didownload pada halaman ini dengan file yang berekstensi pdf

MOTTO DPMPTSP

Kutipan Motto DPMPTSP Kabupaten Badung dan video yang dapat ditonton pada website

MOTTO KAMI

Kanda Dinda

Kami ada untuk anda, Dedikasi Integritas dan Akuntabilitas

Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan motto. Kepuasan masyarakat merupakan tujuan utama kami.

LIHAT PROFIL KAMI

Send message

LAYANAN PENGADUAN

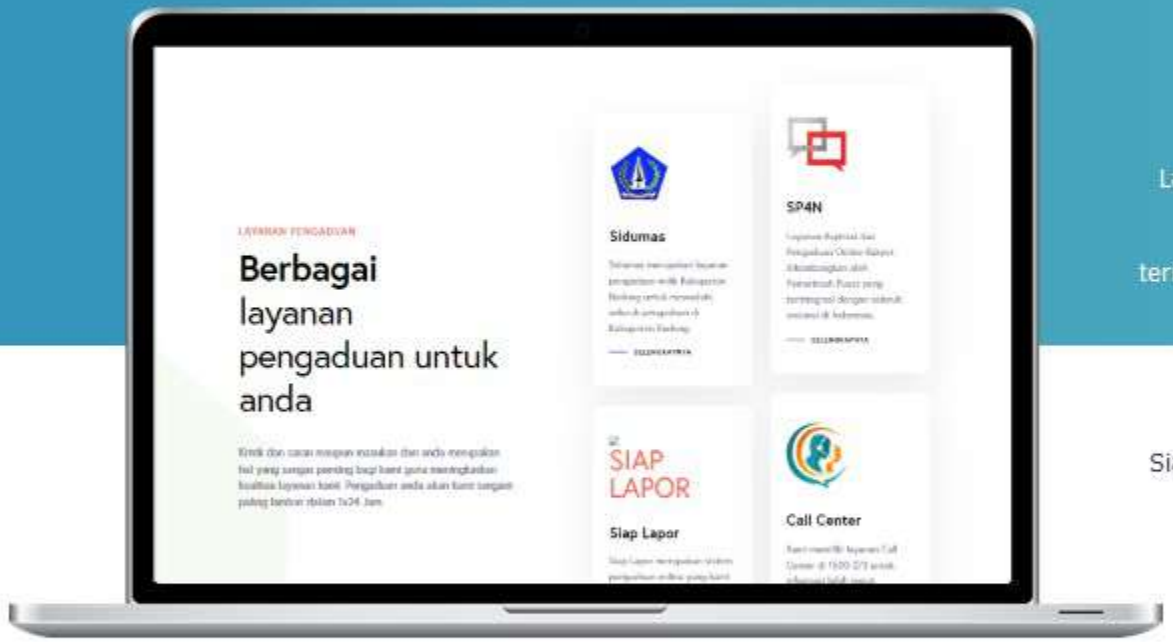

Sidumas

Sidumas merupakan layanan pengaduan milik Kabupaten Badung untuk mewadahi seluruh pengaduan di Kabupaten Badung.

SP4N

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dengan seluruh instansi di Indonesia.

Siap Lapor

Siap Lapor merupakan sistem pengaduan online yang kami kembangkan secara khusus guna memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat.

Call Center

Kami memiliki layanan Call Center di 1500-273 untuk informasi lebih lanjut

KONTAK DPMPTSP KABUPATEN BADUNG

Jika memerlukan informasi terkait dengan DPMPTSP Kabupaten Badung, silahkan hubungi melalui Email, Telepon, Call center maupun fitur pesan yang telah disediakan.

Email
dpmptspbadungkab@gmail.com

Telepon
0361) 471 525 9

Whatsapp
+62 815-5803-1000

Call Center
1500 - 273

Kabid Pengaduan dan Pelaporan
+62 857-3839-3889

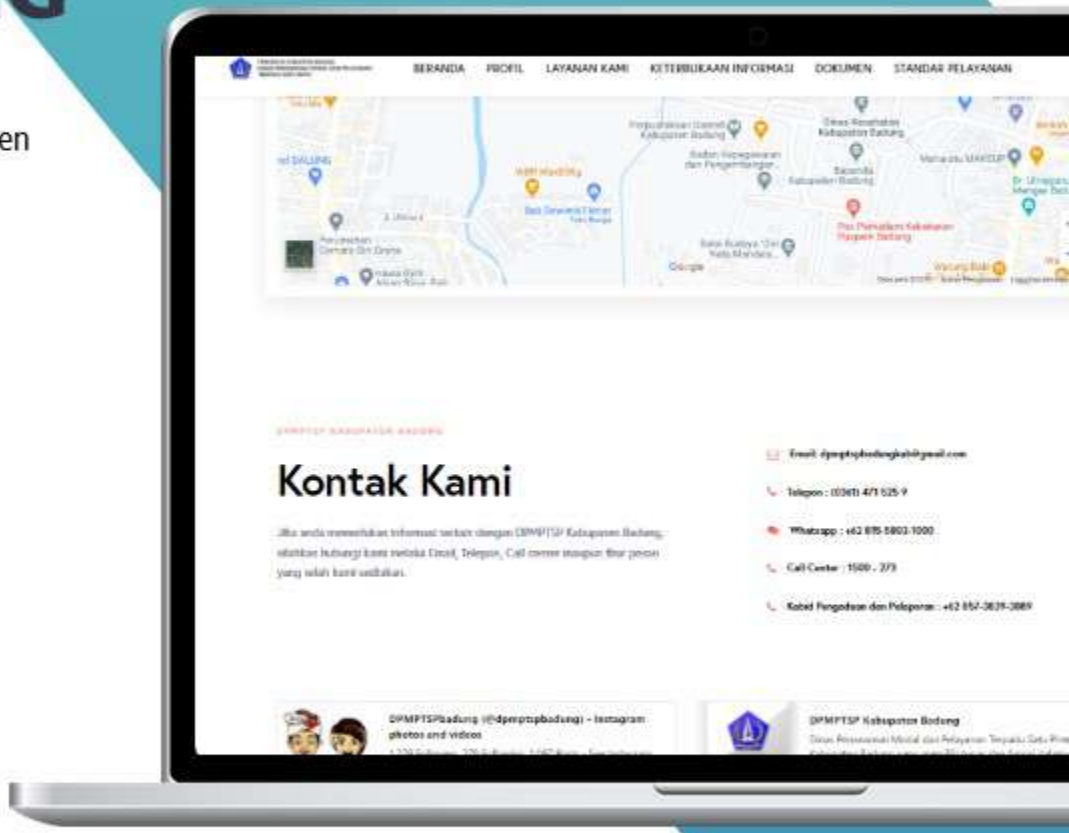

INFOMEDIA CHAMPION (CRM)

E-Learning Purpose…

OUR
SERVICES

OMNICHANNEL ON4

A platform that combining CRM Apps and CIM multichannel with omni customer experience

1. *Various channel selection of : voice, Text Message, Email, Over The Top (OTT) Chat (Line, Telegram, Hangout), Real Time Communication (RTC) Chat, Social Media (Faceboook and Twitter)*

2. *Channel Integrator platform with single database and real time context omni-history*

3. *CRM application options covering: inbound (trouble ticket), and outbound (telesales, teleprofiling, telesurvey, and telecollection)*

4. *Interaction historical data for further reporting and analytical purpose*

Integrated **OMNICHANNEL** Technology

TECHNOLOGY : Integrated OMNICHANNEL Technology

Managing multi channel customer interaction in holistic approach

Elevate customer satisfaction and provide better experience through contextual CRM and omni-history information

Supported with comprehensive interaction data reporting & analytics to help the decision making process

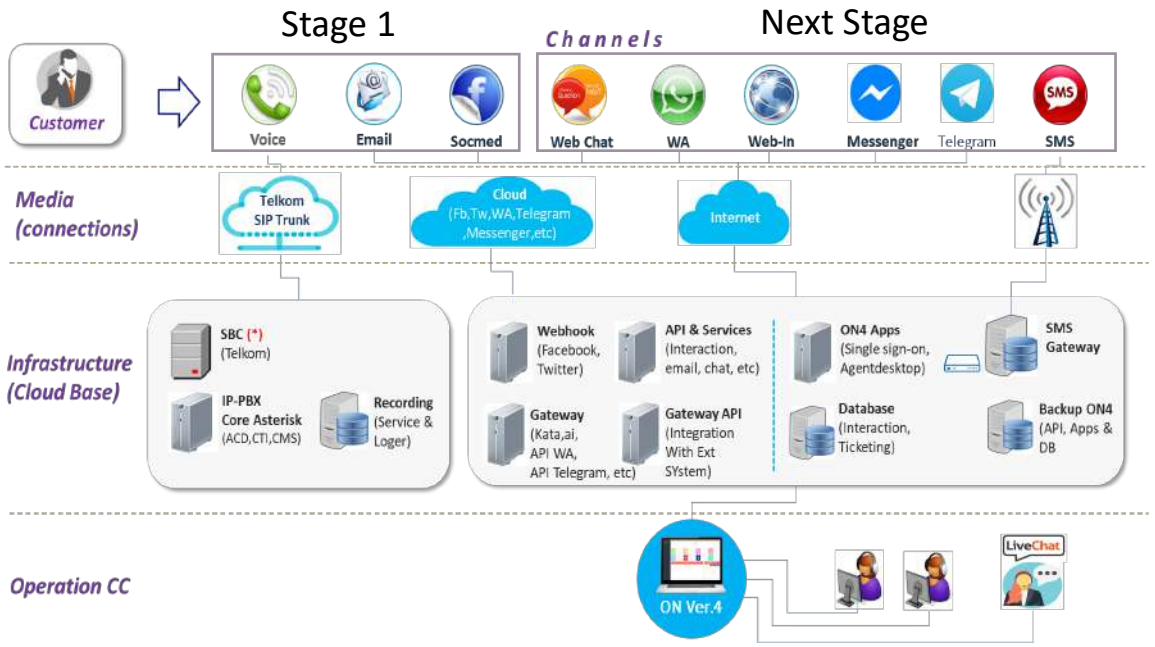

Related Technology

- Agent Anywhere
- Customer Services Bot
- Omnichannel OMS
- Service Desk IOC
- Analytics
- Growth Hacking Solution

Pelihara Persatuan,
Menangkan Persaingan,
Jayalah Indonesia,
Jayalah Telkom Indonesia,
Jayalah Infomedia

infomedia
by Telkom Indonesia

PT. INFOMEDIA NUSANTARA
Jl. RS Fatmawati 77-81 Jakarta, Indonesia 12150
Phone : (021) 7201221 | Fax : (021) 7201226
www.infomedia.co.id

PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PUBLIK

PADA DPMPTSP KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA